

**ANALISIS PENGARUH RASIO DERAJAT DESENTRALISASI
FISKAL, RASIO KETERGANTUNGAN DAN RASIO
KEMANDIRIAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN
2020-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

NAFISAH NURSAFANA

NIM. 4121094

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**ANALISIS PENGARUH RASIO DERAJAT DESENTRALISASI
FISKAL, RASIO KETERGANTUNGAN DAN RASIO
KEMANDIRIAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN
2020-2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

NAFISAH NURSAFANAH

NIM. 4121094

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nafisah Nursafanah**

NIM : **4121094**

Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Nafisah Nursafanah

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nafisah Nursafanah

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Nafisah Nursafanah**

NIM : **4121094**

Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2025

Pembimbing



Farida Rohmah, M.Sc.
NIP. 198801062019082002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kaje Pekalongan, Kab Pekalongan Kode Pos 51161
Website : www.febi.uingusdur.ac.id | email : febi.uingusdur@ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **NAFISAH NURSAFANA**
NIM : **4121094**
Judul : **Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024**

Dosen Pembimbing : **Farida Rohmah, M.Sc.**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Muhammad Nasrullah, SE., M.S.I.
NIP.198011282006041003

Penguji II

Ardiyan Darutama, M.Phil.
NIP.198501262020121004

Pekalongan, 7 November 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. AM. Müh. Khafidz Ma'shum, M.Ag
NIP.197806162003121003

MOTTO

“Nikmati setiap prosesnya, karena mutiara yang berkilau-pun terbentuk melalui proses yang panjang dan penuh tekanan. Teruslah bertumbuh dan jangan pernah menyerah layaknya bunga matahari, meski hujan turun dan langit kelabu, ia tetap tumbuh dan tak berpaling menatap mentari.”

(Nafisah Nursafanah)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al- Baqarah: 286)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.”

(Sutan Sjahrir)

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan serta bantuan, baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis, Ibunda Rohiwati dan Ayahanda Arifin. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Rohiwati, sosok luar biasa yang dengan kasih dan ketulusannya selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis, terimakasih untuk setiap doa yang tak pernah henti, atas kesabaran dan pengorbanan yang tak ternilai, serta cinta yang menjadi alasan penulis untuk terus berjuang hingga saat ini. Teruntuk cinta pertamaku, Ayahanda Arifin, sosok yang menjadi sandaran kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk setiap kegigihannya, terimakasih untuk setiap tetes keringat, doa, dan pengorbanan yang tak pernah lelah engkau berikan demi kebahagiaan anak-anakmu. Engkau adalah sosok yang mungkin tak selalu banyak bicara, tetapi setiap tindakanmu penuh makna dan kasih sayang yang mendalam. Untuk cinta tanpa syarat, dan untuk kasih yang abadi, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kalian.
2. Teruntuk adik tersayang, Luqman Khaeruddin, yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih karena kehadiranmu memberi kekuatan dan keceriaan di saat penulis membutuhkan

dorongan untuk terus melangkah, semoga kamu senantiasa bahagia dan bisa meraih semua mimpimu.

3. Almamater tercinta Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Farida Rohmah, M.Sc. atas ilmu, arahan, dan masukan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, namun juga memberikan dukungan dan motivasi penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Indah Purwanti, M.T. yang selalu membimbing serta memberikan arahan selama perkuliahan. Beliau tidak hanya menjadi pembimbing dalam perjalanan akademik, tetapi juga berperan penting dalam memberikan arahan dan masukan berharga pada penentuan judul skripsi ini.
6. Teman-teman penulis, Rahma, Khabibah, Arinal, Intan, Dyah, dan Dama, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kehangatan untuk setiap moment yang kita lewati bersama. Kalian telah memberi warna, semangat, dan rasa nyaman layaknya keluarga kedua bagi penulis.
7. Terakhir, apresiasi untuk diri penulis sendiri, karena sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah berjuang meski banyak rintangan, tetap melangkah meski lelah, dan tetap percaya meski sempat ragu. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas menerima setiap hal, meski terkadang tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Tidak semua proses berjalan mudah, namun diri ini telah membuktikan bahwa kerja keras dan kesabaran selalu membuahkan hasil. Semoga kedepannya, diri ini senantiasa diberi kekuatan untuk terus berproses, hati yang lapang untuk menerima, dan semangat yang tak pernah padam untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

ABSTRAK

Nafisah Nursafanah, Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun, Kawasan Timur Indonesia masih menghadapi ketimpangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan wilayah barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia tahun 2020-2024.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan data time series (2020-2024) dan cross section (provinsi di Kawasan Timur Indonesia). Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan Eviews 10, dan model terbaik yang dipilih berdasarkan uji Chow, uji Hausman, dan Uji *Langrange Multiplier* (LM) adalah *Random Effect Model* (REM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. kemudian secara simultan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kata Kunci: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

Nafisah Nursafanah, Analysis of the Influence of Fiscal Decentralization Degree Ratio, Dependency Ratio, and Independence Ratio on the Human Development Index (HDI) in Eastern Indonesia for the Years 2020-2024

Human development is a crucial indicator for assessing the success of a region's development. However, Eastern Indonesia still faces disparities in the Human Development Index (HDI) compared to the western region. This study aims to analyze the effect of the Fiscal Decentralization Ratio, the Regional Financial Dependence Ratio, and the Regional Financial Independence Ratio on the Human Development Index (HDI) in Eastern Indonesia from 2020 to 2024.

This research is a type of literature study with a quantitative approach. The data used is panel data, which is a combination of time series data (2020-2024) and cross-sectional data (provinces in the Eastern Indonesia Region). Data analysis was conducted using panel data regression with the help of Eviews 10, and the best model selected based on the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier (LM) test is the Random Effect Model (REM).

The research results show that partially, the fiscal decentralization degree ratio does not have a significant effect on the Human Development Index (HDI), whereas the regional financial dependency ratio and the regional financial independence ratio have a significantly negative effect on the HDI. Then, simultaneously, the fiscal decentralization degree ratio, regional financial dependency ratio, and regional financial independence ratio have a significant effect on the Human Development Index (HDI).

Keywords: Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, and Human Development Index.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat memberikan usaha terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Muhammad Aris Safi'i, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Farida Rohmah, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang bersedia meluangkan waktu, memberikan ilmu, motivasi, dan solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Indah Purwanti, M.T., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Keluarga penulis, Bapak, Ibu, dan Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

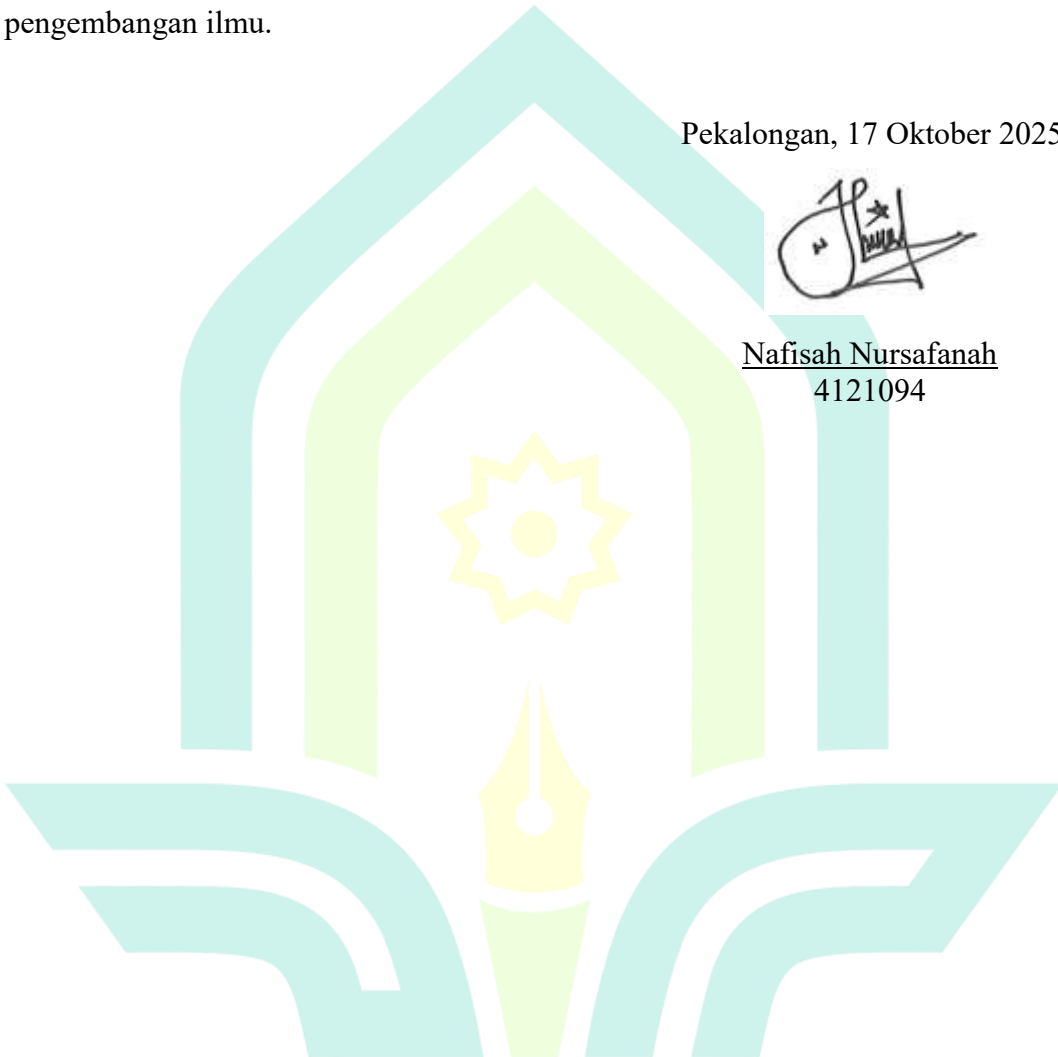
8. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama masa studi.
9. Serta terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 17 Oktober 2025



Nafisah Nursafanah
4121094



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Landasan Teori.....	18
B. Telaah Pustaka	26
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43

B. Pendekatan Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Variabel Penelitian	44
E. Sumber data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisis Data	48
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum	56
B. Analisis Statistik Deskriptif	61
C. Analisis Data Penelitian	63
D. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Keterbatasan Penelitian	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

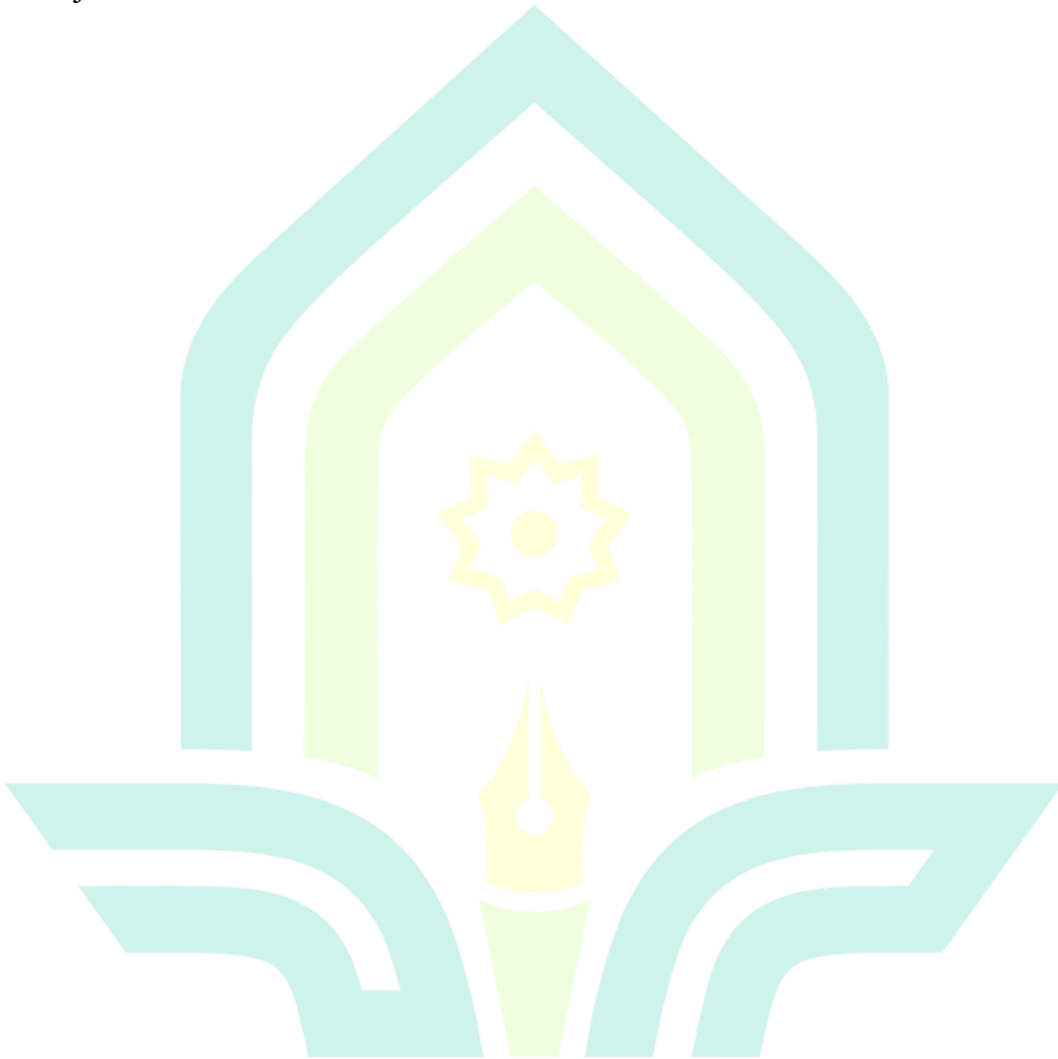
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an/

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Kawasan Timur Indonesia (Miliar) Tahun 2020-2024...	3
Tabel 1. 2 Rata-Rata IPM di Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 3. 2 Sumber Data.....	47
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif.....	61
Tabel 4. 2 Hasil Uji <i>Chow</i>	63
Tabel 4. 3 Hasil Uji <i>Hausman</i>	64
Tabel 4. 4 Hasil Uji <i>Langrange Multiplier</i>	64
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
Tabel 4. 7 Hasil Perbaikan Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4. 9 Hasil Uji <i>Random Effect Model</i>	68
Tabel 4. 10 Hasil Uji <i>t</i>	70
Tabel 4. 11 Hasil Uji <i>F</i>	71
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	72

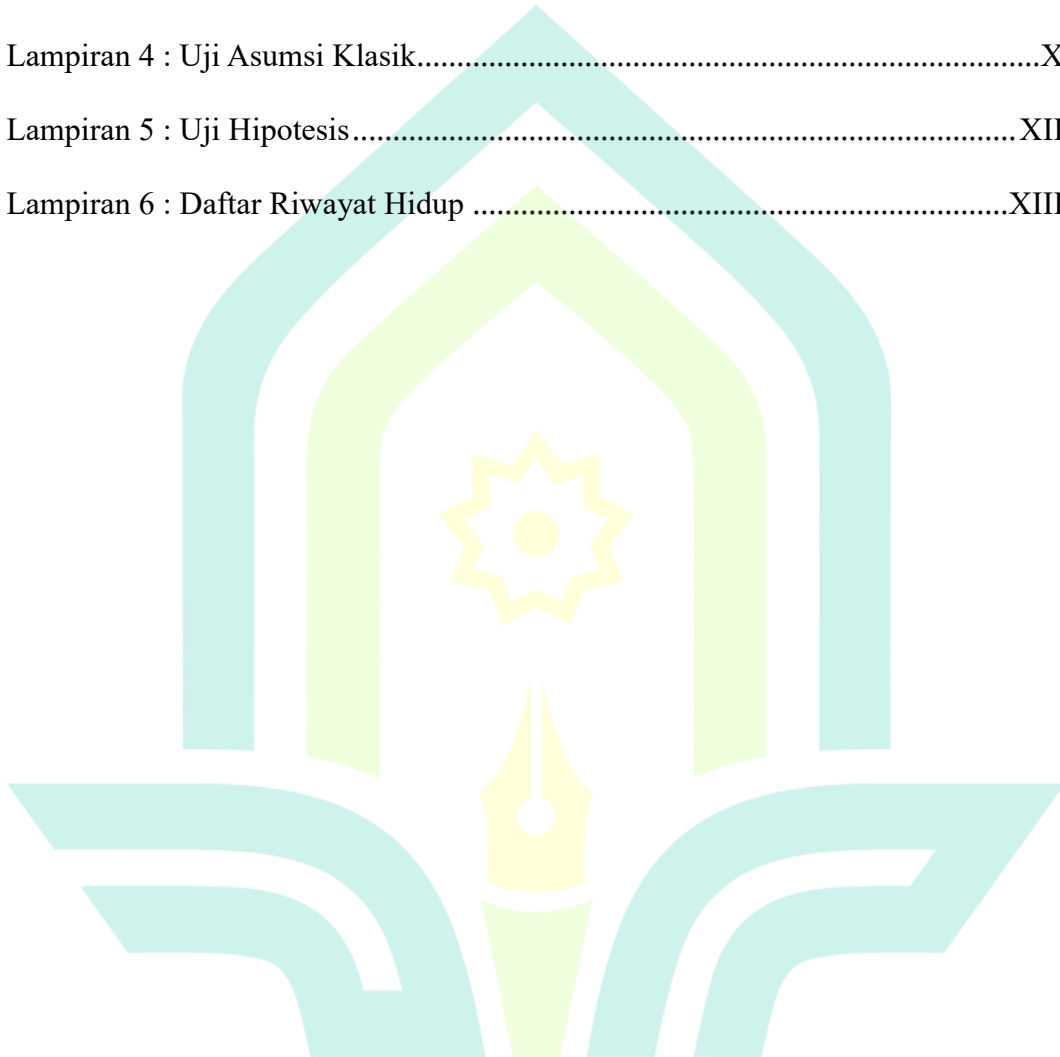
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	37
Gambar 4. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024.....	56
Gambar 4. 2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024.....	57
Gambar 4. 3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024.....	58
Gambar 4. 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian.....	I
Lampiran 2 : Model Estimasi Data Panel	IV
Lampiran 3 : Uji Spesisikasi Model.....	VII
Lampiran 4 : Uji Asumsi Klasik.....	X
Lampiran 5 : Uji Hipotesis.....	XII
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan penerapan prinsip otonomi daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan UU tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola, mengatur, serta membuat kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di daerahnya, sehingga diharapkan hal tersebut menjadikan pemerintah daerah untuk dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan supaya terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Desentralisasi fiskal bisa disebut juga dengan prinsip *money follow function*, yang berarti setiap tugas ataupun wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus dengan diiringi pula alokasi pendanaan yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut (Zulyanto, 2012). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Desentralisasi

fiskal juga menuntut setiap daerah memiliki kapasitas ekonomi yang memadai agar mampu berdiri sendiri dan bersaing dengan daerah lainnya. Karena dengan kemampuan finansial daerah yang baik, maka masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang optimal dalam hal pelayanan dan pemberdayaan.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencakup wilayah-wilayah yang terletak di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, sementara untuk Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi wilayah-wilayah yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali (BPIW Kementerian PUPR, 2017). Sumber daya alam di KTI sangat melimpah, dalam era desentralisasi saat ini seharusnya kekayaan tersebut mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membiayai berbagai kegiatan pemerintahan di wilayah tersebut secara optimal. Dengan penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengatur serta mengoptimalkan potensi sumber pendapatannya secara lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat secara mandiri mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan pembangunan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal, baik pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

Setiap daerah memerlukan sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahannya, dan Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah salah satu sumber utama pendanaan tersebut. PAD

merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai jenis pajak atau pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan kemandirian daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi sebagai wujud dari penerapan desentralisasi (Billah & Wijaya, 2022).

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Kawasan Timur Indonesia (Miliar Rupiah)

Tahun 2020-2024

Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	2.154,15	2.507,32	3.217,81	3.000,76	3.369,79
Kalimantan Tengah	1.570,14	1.851,58	2.523,60	2.416,99	2.824,01
Kalimantan Timur	5.289,23	6.111,92	8.997,26	9.635,87	10.363,08
Kalimantan Selatan	2.940,40	3.564,91	4.558,04	4.499,22	5.539,38
Kalimantan Utara	557,65	677,80	815,66	907,31	1.033,75
Nusa Tenggara Barat	1.815,69	1.888,46	2.292,07	2.568,22	3.293,97
Nusa Tenggara Timur	1.166,57	1.238,03	1.363,74	1.332,05	1.451,44
Sulawesi Utara	1.125,32	1.310,53	1.464,72	1.363,14	1.568,63
Gorontalo	414,86	510,80	510,34	470,85	538,19
Sulawesi Tengah	1.122,67	1.494,25	1.559,71	1.581	2.115,13
Sulawesi Barat	346,86	408	457,41	438,35	509,37

Sulawesi Selatan	3.890,21	4.469,11	4.865,96	4.834,73	5.265,44
Sulawesi Tenggara	1.017,14	1.373,79	1.419,67	1.496,60	1.644,31
Maluku Utara	447,29	552,35	779,23	758,17	623,86
Maluku	545,75	550,81	637,95	577,67	652,25
Papua Barat	485,37	483,95	620,30	530,34	405,37
Papua	1.388,51	2.139,69	2.226,75	736,74	440,28

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025)

Pada tahun 2020, sejumlah provinsi mengalami penurunan PAD akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia maupun berbagai negara lainnya (Syamsul et al., 2022). Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa di tahun 2023 dan 2024 pada Provinsi Papua Barat dan Papua mengalami penurunan PAD yang sangat besar. Penurunan PAD di kedua provinsi tersebut disebabkan karena adanya pemekaran wilayah, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, serta Papua Pegunungan. Akibat dari pemekaran tersebut, akhirnya wilayah administrasi provinsi induk menjadi berkurang, sehingga sumber pendapatan yang sebelumnya dikelola oleh provinsi utama kini terbagi ke daerah-daerah baru (Nurchayanto & Saleh, 2023).

Sedangkan penurunan PAD di Papua dan Papua Barat pada tahun 2024 juga disebabkan oleh menurunnya ekspor serta merosotnya harga komoditas ekspor utama seperti bahan tambang dan mineral (BPS, 2025). Kondisi ini berdampak langsung terhadap penerimaan daerah, karena ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan strategis bagi kedua

provinsi tersebut. Ketika volume ekspor menurun dan harga komoditas global jatuh, maka penerimaan dari sektor-sektor unggulan turut melemah, sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan pada PAD.

Rata-rata PAD di Kawasan Timur Indonesia tergolong masih rendah dibanding rata-rata PAD di kawasan barat. Hal itu dapat dibuktikan dengan rata-rata PAD pada tahun 2024 di kawasan timur hanya Rp. 2.053,03 Miliar, sedangkan rata-rata PAD di kawasan barat mencapai Rp. 9.968,64 Miliar (DJPK Kemenkeu diolah). Rendahnya PAD di Kawasan Timur Indonesia perlu menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, karena peningkatan PAD dapat membantu mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat (Riyadi & Woyanti, 2022).

PAD juga berperan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah. Ketika kinerja pemerintah daerah semakin baik, hal tersebut biasanya tercermin melalui peningkatan pada tingkat kemandirian keuangan daerahnya (Heldi & Zelika, 2020). Dengan demikian, maka pemerintah daerah perlu mengadakan evaluasi, meningkatkan efisiensi kinerja, serta merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila PAD di daerahnya masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) merupakan indikator dalam bidang keuangan yang berguna untuk melihat sejauh mana tingkat

kontribusi PAD dalam total pendapatan di daerah. Apabila tingkat kontribusinya besar, maka menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi juga semakin tinggi (Suwandi & Tahar, 2015). Sumber daya alam di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sangat melimpah, akan tetapi rasio desentralisasi fiskal di wilayah ini justru tercatat lebih rendah dibandingkan dengan KBI. Pada tahun 2024, rata-rata RDDF di KTI hanya mencapai 34,47%, sementara di KBI rata-ratanya sebesar 53,80% (DJPk Kemenkeu diolah).

Pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan besar pada pendapatan transfer masih menjadi persoalan utama dalam penerapan otonomi daerah, terutama dalam aspek pembangunan. Tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah dapat dilihat dari besarnya dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Perbandingan antara jumlah dana transfer dengan total pendapatan daerah menjadi rumus untuk mengukur rasio ketergantungan fiskal suatu daerah (Zukhri, 2020). Jika rasio tersebut menunjukkan angka yang tinggi, maka berarti pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari daerah lain untuk melaksanakan otonominya. Secara umum, rasio ketergantungan keuangan daerah di KTI masih tergolong tinggi jika dibanding KBI. Pada tahun 2024, rata-rata rasio ketergantungan di kawasan timur tercatat sebesar 64,68%, sementara di kawasan barat hanya sekitar 46,04% (DJPk Kemenkeu diolah).

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kesanggupan daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya secara mandiri, termasuk kegiatan pembangunan, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik, dengan mengandalkan pendapatan yang berasal dari pajak maupun retribusi yang diperoleh dari masyarakatnya (Arpani & Halmawati, 2020). Oleh karena itu, kemandirian fiskal menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan daerah, karena dengan keuangan yang mandiri, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara cepat dan efisien. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dihitung berdasarkan perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah yang didalamnya juga termasuk dana transfer dari pusat maupun pinjaman (Mahmudi, 2019). Efektivitas pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk dalam bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan akan mengalami dampak yang negatif jika rasio kemandirian daerah rendah. KTI memiliki kekayaan alam yang berlimpah, seharusnya jika hal itu dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka bisa digunakan untuk menunjang pendapatan asli daerah yang lebih besar. Akan tetapi, setelah melihat data yang ada, ternyata nilai kemandirian keuangan daerah di KTI masih lebih rendah dibanding KBI. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya rata-rata RKKD pada tahun 2024 di KTI yang hanya sebesar 58,68%, sedangkan untuk rata-rata di KBI mencapai 139,85% (DJPK Kemenkeu diolah).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan di suatu daerah. Jadi, konsep tersebut menggambarkan bahwa parameter pembangunan bukan hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan penduduknya (UNDP, 2022). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah diperlukan pelayanan publik yang berkualitas, dan hal itu dapat terwujud melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Sehingga semua kesinambungan tersebut akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari semakin tingginya IPM (T. Anggraini & Sutaryo, 2015).

Tabel 1. 2 Rata-Rata IPM di Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia Tahun 2020-2024

Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kawasan Timur Indonesia	69,06	69,36	69,97	71,36	71,90
Kawasan Barat Indonesia	73,10	73,36	73,96	74,58	75,23

Sumber: BPS, data diolah (2025)

Data dalam tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa IPM di KTI memiliki rata-rata yang jauh lebih rendah dibanding dengan KBI. Akan tetapi apabila dilihat secara menyeluruh, IPM di Kawasan Timur Indonesia tergolong cukup baik karena berada di atas 60%. Pada tahun 2023 dan 2024, nilai IPM sudah tergolong tinggi karena berada di atas 70%. Namun demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata

IPM nasional, yaitu sebesar 74,39% pada tahun 2023 dan 75,02% pada tahun 2024 (BPS, 2025). Jadi hal tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan di KTI sudah dapat diakses dengan baik, hanya saja memang belum sempurna dan merata jika dibandingkan dengan di KBI.

Keterbatasan infrastruktur yang mendukung sektor pendidikan dan kesehatan di KTI menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan pembangunan manusia di daerah tersebut. Fasilitas pendidikan yang belum memadai seperti kurangnya jumlah sekolah dan kualitas sarana belajar, serta sulitnya akses ke sekolah di daerah-daerah terpencil, menyebabkan terhambatnya akses masyarakat untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik. Dan hal itu akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah di wilayah tersebut (Sihombing & Kusuma, 2022). Selain itu, fasilitas kesehatan yang minim di daerah terpencil seperti kurangnya puskesmas, rumah sakit, serta para tenaga medis profesional, juga akan menjadi hambatan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Akibat dari kondisi tersebut, angka harapan hidup menjadi rendah, serta angka kematian ibu dan bayi juga cenderung tinggi (Wardhana & Kharisma, 2023). Sehingga desentralisasi memberikan tuntutan bahwa pembangunan infrastruktur harus dapat dilakukan secara optimal dan merata agar memberikan dampak yang baik pada

kesejahteraan masyarakat, dan hal itu akan membuat IPM yang ada di daerah tersebut semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini akan difokuskan pada segi kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan melalui variabel IPM. Penilaian baik ataupun tidaknya pembangunan manusia di suatu daerah dapat diukur dengan melihat kinerja keuangan pemerintah daerahnya, sehingga hal itu dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan daerah tersebut (Hendri & Yafiza, 2020). Terdapat berbagai jenis rasio yang dipakai untuk menilai kinerja keuangan daerah. Penelitian ini akan memakai tiga jenis rasio, yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, serta rasio kemandirian keuangan daerah. Pemilihan ketiga rasio ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi langsung pada tujuan penelitian, yaitu analisis pengaruh kapasitas fiskal daerah terhadap IPM. Meskipun ada banyak rasio keuangan lainnya seperti rasio efektivitas, efisiensi belanja, dan lain-lain, namun rasio tersebut hanya bersifat teknis dan operasional, sehingga tidak secara langsung merepresentasikan otonomi dan ketergantungan fiskal daerah secara menyeluruh (D. E. Anggraini & Prayoga, 2024). Sehingga pemilihan ketiga rasio tersebut dianggap paling tepat dan relevan untuk mewakili fokus kajian terhadap hubungan kapasitas fiskal daerah dengan pencapaian pembangunan manusia di KTI.

Meskipun hubungan antara variabel-variabel independen tersebut pada IPM telah banyak diteliti di berbagai wilayah Indonesia, namun hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Oleh karena itu dikemukakan *research gap* pada penelitian tentang pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Hamimah dan Zulkarnain (2020) mengemukakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal mempengaruhi IPM di Jawa Barat. Sedangkan penelitian Soleh dan Ardilla (2018) mengemukakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi IPM di Kota Jambi.

Penelitian Asri et al. (2025) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan Timur. Sedangkan menurut Digdowiseiso dan Satrio (2022) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan tidak berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan Selatan. Kemudian penelitian dari Mauludin dan Dewi (2020) mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Banten. Sedangkan penelitian dari Munfarida dan Priyoadmiko (2020) mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan adanya sejumlah perbedaan temuan yang beragam seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan kajian serupa dalam menentukan

variabel yang mempengaruhi IPM oleh variabel rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Kebanyakan penelitian sebelumnya meneliti di lingkup kabupaten/kota, provinsi, maupun wilayah Indonesia secara keseluruhan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gian Riksa (2021) yang menggunakan variabel penelitian serupa namun hanya meneliti pada lingkup kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat penelitian lainnya seperti penelitian dari Santi H. dan Nenik W. (2021) yang juga menggunakan salah satu variabel independen dan dependen yang sama dengan penelitian ini namun penelitiannya dilakukan pada lingkup yang lebih luas, yakni seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga penelitian ini melakukan pembaharuan dengan memfokuskan penelitian di bagian kawasan Indonesia yang rata-rata IPM-nya lebih rendah dibandingkan dengan bagian kawasan Indonesia lainnya, yakni Kawasan Timur Indonesia (KTI). Selain itu, pada saat yang sama, bagian wilayah ini juga menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan fiskal pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta rendahnya tingkat kemandirian fiskal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana kapasitas fiskal daerah memengaruhi pencapaian IPM, dan apakah desentralisasi fiskal yang telah berjalan mampu meningkatkan kesejahteraan manusia di wilayah tersebut. Penelitian ini juga melakukan pembaharuan dengan menggunakan data tahun terbaru, yakni selama

rentang waktu dari 2020-2024, dimana tahun tersebut juga merupakan periode yang mencakup fase penting dalam dinamika fiskal dan pembangunan nasional karena mencakup masa selama dan sesudah pandemi COVID-19. Selain itu, pada tahun 2024 Indonesia juga mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi karena disebabkan oleh menurunnya tingkat ekspor akibat melemahnya permintaan global dan penurunan harga komoditas ekspor (BPS, 2025). Dengan demikian, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024. Sehingga penelitian ini akan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka penelitian ini akan menggunakan rumusan masalah berikut:

1. Apakah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024?

2. Apakah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024?
3. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024?
4. Apakah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024.
2. Menganalisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024.
3. Menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024.

4. Untuk menganalisis apakah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh atau tidak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa membantu pembaca, terutama mahasiswa, untuk mengembangkan pemahaman akademisnya dalam bidang keuangan regional dan ekonomi pembangunan. Mahasiswa juga dapat memahami bagaimana pengelolaan keuangan memiliki dampak yang terukur pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi panduan bagi penelitian mendatang lainnya terkait IPM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang relevan untuk memaksimalkan potensi dan sumber pendapatan daerah dengan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak. Karena langkah ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berfokus dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam IPM.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai arah pembangunan yang sesuai bagi daerahnya. Karena masyarakat tidak cuma berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan juga sebagai pelaku aktif dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, pembangunan daerah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehingga partisipasi masyarakat sebagai pengawas sangat diperlukan agar pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi yang berlaku.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis tentang pengelolaan keuangan daerah serta hubungannya dengan pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori federalisme fiskal serta landasan teori pada setiap variabel penelitian. Kemudian menyajikan rangkuman kajian terdahulu yang relevan dalam tema penelitian dan menampilkan skema kerangka berpikir serta hipotesis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variabel yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, hasil analisis data, serta pembahasan yang didasarkan pada temuan dari hasil analisis tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab lima memuat kesimpulan yang diambil setelah semua proses penelitian diselesaikan. Selain itu, bab ini juga memaparkan mengenai keterbatasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2020-2024.
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2020-2024.
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia tahun 2020-2024.
4. Rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2020-2024. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,575355 menunjukkan bahwa sebesar 57,5% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel fiskal tersebut, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

B. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat disempurnakan dengan penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Periode penelitian yang relatif singkat (2020–2024) pada penelitian ini membuat hasilnya belum mampu menggambarkan pengaruh jangka panjang kebijakan fiskal terhadap peningkatan IPM di Kawasan Timur Indonesia.
- b. Variabel independen terbatas pada tiga rasio fiskal, yakni derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah, sehingga belum mencakup faktor lain yang berpotensi mempengaruhi IPM yang belum dianalisis dalam studi ini.
- c. Pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat pada akhir tahun 2022 menyebabkan perbedaan cakupan dan konsistensi data, sehingga dapat memengaruhi akurasi hasil analisis dan interpretasi temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, W., Rayyani, I., & Nurfadilah. (2018). Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015. *Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya)*, 6 (2), 30–44.
- Anggraini, D. E., & Prayoga, B. E. D. (2024). Optimizing Regional Budget Management through Financial Ratio Analysis. *BUSINESS AND APPLIED MANAGEMENT JOURNAL*, 01 (02), 65–77.
- Anggraini, T., & Sutaryo. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal SNA 18 Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2 (1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Asri, J. D., Sinurat, M., & Agustina, I. (2025). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (2017-2022)*.
- Asyiah, N. (2018). *Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM)*. Universitas Islam Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia 2015*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024*. 85.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- Billah, H. M., & Wijaya, R. S. (2022). Pengaruh PAD, DAU, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (8).
- BPIW Kementerian PUPR. (2017). Sinergi Buletin: Percepatan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia Edisi 16. *Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR* (Issue April). www.bpiw.pu.go.id
- BPS. (2025). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Budiratna, H., & Qibthiyyah, R. M. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1 (5), 402–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v1i05.103>
- Cahyani, A. R., Aida, N., & Yuliawan, D. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Makanan Perkapita, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Provinsi Lampung. *Jurnal Ekobistek*, 13 (1), 13–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i1.770>
- Digdowniseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4 (3), 1170–1181. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1167>
- DJPK Kemenkeu. (n.d.). *Portal Data SIKD*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd%0D>
- Elia Ardyan, Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing.

- Fatimah, H. S., Sriningsih, S., Pascayanti, Y., & Yusuf, F. (2023). *Digital Divide Solutions and Public Service Policy Implementation in Indonesia after the Covid-19 Pandemic*. 06 (08), 3801–3818. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i8-30>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke-9*. Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5 (2), 116–130. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>
- Halim, A., & Kusufi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hamimah, H., & Zulkarnain, Z. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap IPM Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1 (2), 11–18. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.922>
- Handayani, L., Seniorita, Anantadjaya, S. P., Hendrawan, H., & Tannady, H. (2023). *Analysis of the Influence of Fiscal Decentralization, Dependency Ratio, and Ratio of Independence on the Human Development Index in East Region of Indonesia*. 9 (1), 140–147.
- Hapsari, M. T., Fitriani, E. D., Agmiana, I. S., Eka, A., Fadhilah, N., S, R. A. Q., Puput, C., & Mei, T. (2024). *Analisa Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Pendapatan, Pajak, dan Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023*. 3 (4), 311–321.
- Hardani, A. (2020). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan dan Teknik Studi*. Mitra Pustaka.

- Hayek, F. A. (1945). "The Use of Knowledge in Society" *American Economic Review. American Economic Association*, 35 (4), 519–530.
- Hehamahua, H. (2014). Analisis APBD Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah. *Media Trend*, 9 (1), 54–68.
- Heldi, & Zelika, Y. Z. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 2 (1).
- Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4 (1), 56–66. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216>
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, dan Teknologi Terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 23 (4), 122–137.
- Honggara, A., & Jamaluddin, J. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 3 (1), 1. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i1.7343>
- Iba, Z. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Kebangsaan*, 5 (10), 19–26.
- Juniarti, J., Noersanti, L., Akhmadi, A., Mustika, M., Ardheta, P. A., & Hendro, J. (2023). Pendapatan Daerah dan Fiskal Stress Akibat Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 8 (1), 11–22. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v8i1.1038>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi

- Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3 (2).
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi 4*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI.
- Maulana, S. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Metaverse Adptersi*, 2 (2), 10–16. <https://jurnal.adptersi.or.id/index.php/jma>
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8 (3).
- Munfarida, S., & Priyojadmiko, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *AMAR (Andalas Management Review)*, 4 (2), 46–59. <https://doi.org/10.25077/amar.4.2.46-59.2020>
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill Book Company.
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2 (1), 42. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2), 212–222. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Nurchayanto, A., & Saleh, M. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan*

Provinsi Baru di Papua Berdasarkan Hukum Otonomi Daerah. 20 (2), 493–507.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Potale, A., Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. (2024). Analisis Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. *Oikos-Nomos Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 17 (2).

Purba, S., & Hutabarat, R. C. (2017). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN Kediri. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 1 (1), 228–240.

Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11 (2).

Riyadi, M. D., & Woyanti, N. (2022). Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat. *MAKSIMUM*, 12 (1), 13. <https://doi.org/10.26714/mki.12.1.2022.13-26>

Saputra, B., & Fernando, R. (2017). *Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman*. 5 (3), 1515–1533.

Setyowati, L. A. (2022). *Skema Realokasi Program Dan Anggaran Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Indonesia*. 448–453.

Sihombing, R. S. T., & Kusuma, N. P. (2022). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)*, 1 (2), 143–151.

Silooy, R. W., Latuamury, J., & Sapulette, S. G. (2023). *Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tengah*. 5 (6), 2630–2638.

Simandjuntak, D. S., dkk. (2022). *Otonomi Daerah: Gagasan Dan Kritik*. Penerbit

Buku Kompas.

Soleh, A., & Ardilla, A. (2018). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1 (2), 17–26.

Sudhipongpracha, T., & Wongpredee, A. (2016). Fiscal Decentralization in Comparative Perspective: Analysis of the Intergovernmental Grant Systems in Indonesia and Thailand. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 19 (3), 245–261. <https://doi.org/10.1080/13876988.2016.1138659>

Sugiyono. (2019). *Sugiyono Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Cv. Alfabeta.

Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *InFestasi*, 11 (2), 118. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127>

Syamsul, Rosyada, D., & Wahyono, D. (2022). *Pendapatan Daerah di Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi*. 20 (2), 125–139.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

UNDP. (2022). *Human development report 2021-22, Uncertain Times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world*.

Wardhana, A., & Kharisma, B. (2023). Infrastruktur dan Pengeluaran Bidang Kesehatan Terhadap Kualitas Hidup di Indonesia. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11 (2), 145–156.

Wibawa, G. R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3 (2).

Wibowo, S. A. (2025). *Penggunaan EViews dalam Pengujian Data Panel untuk Penelitian Akuntansi: Pendekatan Konseptual dan Aplikatif*. 9 (1). <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26898>

Williantara, G. F. (2016). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2009-2013*. Universitas Udayana Denpasar.

Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5 (2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>

Zulyanto, A. (2012). *PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU*. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 1 (1), 31. <https://doi.org/10.24036/ecosains.346557.00>